ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DAN STRATEGI MEWUJUDKAN SMART CITY DI KABUPATEN CIREBON

Yudha Saputra
NPP. 33.0420
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Email: yudhagputra@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Agung Nurrahman S.STP, M.PA
Email: agung_nurrahman@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *This study analyzes the problems of suboptimal Smart City implementation in Cirebon Regency, caused by limited technological facilities, fragmented data management among regional agencies, and low public awareness of the Smart City concept.* ***Purpose:*** *The purpose of this study is to analyze the role of collaborative governance in optimizing Smart City in Cirebon district.* ***Method:*** *This research employed a qualitative descriptive approach with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model, grounded in the Collaborative Governance framework by Ansell and Gash (2007), covering Starting Condition, Institutional Design, Facilitative Leadership, and Collaborative Process.* ***Result:*** *The findings reveal that collaboration among the government, private sector, and the community has effectively optimized Smart City implementation through strengthened coordination, policy integration, and broader public participation. Cirebon Regency's SPBE Index reached 3.43 with a "Very Good" predicate, supported by 73 regional agencies actively contributing to innovation. Diskominfo's strategies encompass digital infrastructure reinforcement, inter-agency system integration, human resource capacity building, private-sector collaboration, and digital literacy socialization.* ***Conclusion:*** *The conclusion confirms that collaborative governance is essential for optimizing Smart City in Cirebon Regency. It is recommended to strengthen cross-sector coordination, expand digital literacy programs, and develop Cirebon Smart Village 2025 as a strategic recommendation for the Cirebon Regency Government in advancing modern, transparent digital governance oriented toward improving public service quality across all society levels.*

Keywords: *Collaborative Governance; Digital Governance; Diskominfo; Kabupaten Cirebon; Public Services; Smart City*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini berfokus pada permasalahan belum optimalnya implementasi *Smart City* di Kabupaten Cirebon yang disebabkan oleh keterbatasan sarana teknologi, fragmentasi pengelolaan data antarperangkat daerah, serta rendahnya pemahaman

masyarakat terhadap konsep kota cerdas. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran *collaborative governance* dalam mengoptimalkan penerapan *Smart City* di Kabupaten Cirebon. **Metode:** Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, berlandaskan kerangka *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2007) yang mencakup empat dimensi utama yaitu *Starting Condition*, *Institutional Design*, *Facilitative Leadership*, dan *Collaborative Process*. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat terbukti berhasil mengoptimalkan penerapan *Smart City* melalui penguatan koordinasi lintas sektor, integrasi kebijakan, serta perluasan partisipasi publik. Indeks SPBE Kabupaten Cirebon berhasil mencapai skor 3,43 dengan predikat Sangat Baik, yang didukung oleh 73 perangkat daerah yang aktif berinovasi. Strategi yang dijalankan Diskominfo meliputi penguatan infrastruktur digital, integrasi sistem antarperangkat daerah, peningkatan kapasitas aparatur, kerja sama sektor swasta, serta sosialisasi literasi digital secara masif. **Kesimpulan:** Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa *collaborative governance* merupakan kunci sukses optimasi *Smart City* di Kabupaten Cirebon. Disarankan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor yang lebih formal, perluasan program literasi digital bagi masyarakat, serta pengembangan program *Cirebon Smart Village* 2025 sebagai rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang modern, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Collaborative Governance; Diskominfo; Kabupaten Cirebon; Pelayanan Publik; Smart City; Tata Kelola Digital

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era disrupsi digital yang terjadi saat ini telah membawa perubahan fundamental dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bukan lagi sekadar alat pendukung, melainkan menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fenomena urbanisasi yang masif dan kompleksitas masalah perkotaan menuntut pemerintah daerah untuk mengadopsi konsep *Smart City* (Kota Cerdas) sebagai solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Konsep *Smart City* menurut Cohen (2014) tidak hanya terbatas pada penggunaan teknologi canggih semata, melainkan integrasi harmonis antara infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi yang didukung oleh tata kelola yang cerdas (*smart governance*) untuk menciptakan kehidupan kota yang berkelanjutan.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah memberikan kerangka hukum yang jelas bagi daerah untuk melakukan percepatan transformasi digital. Kabupaten Cirebon, dengan posisi geografisnya sebagai pintu gerbang strategis di Jawa Barat, memiliki tuntutan besar untuk segera beradaptasi dengan tren digitalisasi ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk membangun ekosistem digital, termasuk penyediaan *data center*, pengembangan aplikasi pelayanan publik, dan integrasi jaringan fiber optik antarperangkat daerah. Namun, transformasi ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Dalam praktiknya, implementasi *Smart City* di Kabupaten Cirebon masih menemui hambatan yang bersifat struktural dan kultural. Masalah utama yang muncul adalah adanya *silo mentality* atau ego

sektoral antarperangkat daerah yang menyebabkan fragmentasi data dan tidak terintegrasinya sistem pelayanan. Di samping itu, kesenjangan akses infrastruktur teknologi dan rendahnya tingkat literasi digital sebagian masyarakat menjadi kendala serius yang menghambat adopsi layanan digital secara merata. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur teknologi tanpa dibarengi dengan perbaikan tata kelola kolaboratif akan membuat *Smart City* hanya menjadi proyek administratif tanpa memberikan dampak nyata (*impactful*) bagi masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan *Collaborative Governance* yang dirumuskan oleh Ansell dan Gash (2007) sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Pendekatan ini memandang bahwa keberhasilan *Smart City* sangat bergantung pada forum kolaborasi formal yang mempertemukan pemerintah sebagai regulator, sektor swasta sebagai mitra penyedia inovasi, dan masyarakat sebagai pengguna sekaligus pengawas. Peneliti memandang bahwa pola hubungan kolaboratif di Kabupaten Cirebon masih perlu dipetakan kembali, terutama dalam hal bagaimana Diskominfo mampu memainkan peran kepemimpinan fasilitatif untuk menyelaraskan kepentingan berbagai aktor tersebut agar program *Smart City* dapat berjalan secara berkelanjutan.

Penelitian ini menjadi relevan karena mengkaji bagaimana sinkronisasi kebijakan, pembagian peran, dan manajemen kolaborasi dikelola dalam lingkungan birokrasi pemerintahan daerah. Dengan memahami dinamika kolaborasi ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih taktis dan aplikatif bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengatasi kendala integrasi sistem dan mempercepat pencapaian indikator *Smart City*. Melalui penelitian ini, penulis bermaksud menguraikan secara mendalam bagaimana integrasi tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dapat menjadi mesin penggerak utama dalam mewujudkan visi Cirebon sebagai daerah yang cerdas, inovatif, dan berdaya saing di masa depan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya implementasi *Smart City* di Kabupaten Cirebon yang disebabkan oleh fragmentasi kebijakan, ketidaksiapan infrastruktur, dan rendahnya sinergi antar-aktor, padahal program *Smart City* merupakan agenda prioritas daerah.

Ada beberapa kesenjangan yang melatarbelakangi penelitian ini. Pertama, *empirical gap*: banyak penelitian terdahulu mengenai *Smart City* di Cirebon hanya berfokus pada evaluasi kualitas teknis aplikasi (*WebQual*), namun belum menyentuh dinamika proses kolaborasi aktor-aktor yang terlibat. Kedua, *knowledge gap*: masih terbatasnya kajian yang menganalisis efektivitas *Collaborative Governance* (Ansell & Gash) secara spesifik dalam memecahkan masalah integrasi data di tingkat kabupaten. Ketiga, *methodological gap*: penelitian ini menonjolkan analisis kualitatif deskriptif untuk menggali *collaborative process* yang tidak terungkap dalam survei kuantitatif standar.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kolaborasi dalam penerapan *Smart City* di Kabupaten Cirebon sebagai dasar perumusan strategi penguatan kelembagaan oleh Diskominfo. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah daerah akan kehilangan landasan empiris dalam memetakan hambatan kolaborasi, sehingga kebijakan digitalisasi berisiko menjadi tidak sinkron dan tidak berkelanjutan. Akibatnya, alokasi anggaran dan upaya pengembangan *Smart City* dapat berjalan kurang optimal, bahkan stagnan, karena tidak didukung oleh strategi kolaboratif yang terarah sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait tata kelola dan pemberdayaan digital. *Pertama*, Raharjo & Hendra (2024) mengkaji pengembangan wisata budaya berbasis digital di Cirebon dengan fokus pada partisipasi masyarakat. *Kedua*, Priyono (2022) mengevaluasi efektivitas *Smart City* di Cirebon dari sisi teknis sistem informasi. *Ketiga*, Sanda & Handayani (2025) menganalisis *collaborative governance* dalam percepatan program kesehatan di Bogor. *Keempat*, Firman & Rahmawati (2023) membahas tata kelola *Smart City* nasional dengan pendekatan kolaborasi. *Kelima*, Yahya & Sudarmo (2022) meneliti implementasi kebijakan *e-government* melalui program EPPSON di Surakarta. Secara umum, penelitian tersebut menunjukkan variasi metode kualitatif dan kuantitatif dalam membedah tata kelola digital, namun masih minim yang menggabungkan secara spesifik variabel *collaborative governance* dalam konteks implementasi *Smart City* di daerah.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu. Kebaruan penelitian ini terletak pada konteks objek penelitian yaitu fokus pada efektivitas *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2007) dalam mengatasi fragmentasi kebijakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang mendalam untuk mengeksplorasi proses kolaborasi antar-aktor (Pemerintah, Swasta, Masyarakat). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat parsial atau teknis, penelitian ini memberikan model analisis integratif untuk mengurai tantangan implementasi digital di wilayah penyangga yang memiliki karakteristik geo-strategis khas Kabupaten Cirebon.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Collaborative Governance* dalam mengoptimalkan penerapan *Smart City* di Kabupaten Cirebon.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk menggali secara mendalam dinamika *collaborative governance* dalam implementasi *Smart City* di Kabupaten Cirebon, yang tidak dapat dipotret hanya melalui data statistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami proses kolaborasi, tantangan integrasi kebijakan, serta interaksi antar-aktor (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat) secara kontekstual melalui kerangka *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2007). Dengan demikian, pendekatan ini dinilai paling tepat untuk menangkap kompleksitas fenomena tata kelola pemerintahan digital yang dinamis.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memastikan data yang diperoleh berasal dari pihak yang paling memahami substansi program. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai pengambil keputusan utama; Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Teknologi dan Informatika, Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Government, serta Kepala Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik sebagai teknokrat dan pelaksana kebijakan di lapangan. Selain itu, melibatkan pihak swasta sebagai mitra ahli IT untuk memberikan perspektif teknis implementasi, serta perwakilan masyarakat sebagai pengguna layanan digital untuk melihat dampak langsung program. Kombinasi informan ini dipilih agar diperoleh gambaran yang utuh dari sisi kebijakan, eksekusi teknis, mitra strategis, hingga perspektif pengguna.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari jajaran Diskominfo, mitra swasta, dan masyarakat) dan triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, serta analisis dokumen resmi daerah). Dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan melalui *audit trail* berupa pencatatan kronologis proses penelitian secara sistematis sehingga dapat ditelusuri kembali validitasnya.

Analisis data dilakukan melalui model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup tiga tahapan: reduksi data (memilah informasi relevan terkait kolaborasi), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan kerangka teori *collaborative governance* untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun hambatan dalam mencapai indikator *Smart City*.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu pada bulan Januari hingga April 2026, yang mencakup proses observasi awal, pelaksanaan wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumen kebijakan terkait. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi implementasi *Smart City* secara aktual, mendalam, dan komprehensif sesuai dengan dinamika perkembangan digital yang sedang berjalan di Kabupaten Cirebon.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis *Collaborative Governance* dan strategi mewujudkan *Smart City* di Kabupaten Cirebon. Penulis menggunakan kerangka kerja Ansell dan Gash (2007) yang mencakup empat dimensi utama: *Starting Condition, Institutional Design, Facilitative Leadership,* dan *Collaborative Process*. Pembahasan ini juga mengintegrasikan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai motor penggerak digitalisasi daerah.

3.1. *Starting Condition* (Kondisi Awal Kolaborasi)

Starting condition merupakan dimensi yang memetakan situasi sebelum kolaborasi terbentuk, mencakup sejarah hubungan antar-aktor, ketimpangan sumber daya, serta insentif untuk berkolaborasi. Berdasarkan data dokumentasi, Kabupaten Cirebon memulai perjalanan *Smart City* dengan kondisi infrastruktur yang terfragmentasi.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Diskominfo (19 Januari 2026) mengungkapkan:

"Dulu itu, data kita masih mencar-mencar di tiap dinas. Sekarang alhamdulillah, pelan-pelan kita benahi. Kita udah punya 67 unit server sendiri, terus jaringan fiber optic udah masuk ke 29 OPD.".

Kondisi awal yang bersifat *silo* (terkotak-kotak) ini menjadi pendorong utama bagi Diskominfo untuk menciptakan inisiatif kolaboratif. Insentif institusional berupa target pencapaian indeks SPBE menjadi daya dorong utama bagi OPD lain untuk mau terlibat. Dengan total 67 unit server dan 29 jaringan *fiber optic*, pemerintah daerah membangun modal dasar yang memungkinkan kolaborasi teknis dapat dilaksanakan, meskipun di awal perjalanan terdapat tantangan ketimpangan kapasitas SDM antarkecamatan.

3.2. *Institutional Design* (Desain Kelembagaan)

Dimensi ini meninjau aturan dasar, forum partisipasi, dan transparansi kebijakan. Desain kelembagaan di Kabupaten Cirebon telah memiliki landasan hukum yang cukup kokoh melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK dan Perbup Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pengelolaan SPBE.

Aturan ini menjadi "kontrak sosial" formal bagi seluruh aktor untuk berkolaborasi. Keberadaan Tim Koordinasi SPBE dan peran *Government Chief Information Officer* (GCIO) memperjelas struktur tata kelola. Indikator transparansi dalam desain kelembagaan juga terbukti melalui raihan anugerah "Kabupaten Informatif" dari Komisi Informasi Jawa Barat pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *institutional design* yang dibangun tidak hanya bersifat administratif-formal, tetapi juga diakui secara eksternal melalui mekanisme *monitoring* dan evaluasi yang transparan.

3.3. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Diskominfo Kabupaten Cirebon menjalankan peran sebagai pemimpin fasilitatif dengan menjadi "dirigen" dalam orkestrasi kolaborasi lintas sektor. Kepemimpinan ini ditunjukkan melalui kemampuan menyelaraskan kebutuhan 19 Perangkat Daerah untuk menyediakan layanan publik terintegrasi. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Gov (19 Januari 2026) menegaskan:

"Melalui kolaborasi, proses menyatukan kebutuhan tiap perangkat daerah dengan dukungan teknologi dari pihak luar menjadi jauh lebih mudah. Karena itu, Smart City tidak hanya berbicara tentang hadirnya aplikasi, namun juga tentang kesamaan pemahaman, arah kerja dan komitmen semua pihak...". Tabel 3.1 di bawah ini menunjukkan tingkat partisipasi OPD dalam mendukung inovasi *Smart City*:

Tabel 3.1 Partisipasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Inovasi Smart City

Kategori Partisipasi	Jumlah OPD	Persentase
Sangat Aktif (Integrasi Sistem)	48	65,7%
Cukup Aktif (Pelaporan Rutin)	18	24,7%
Kurang Aktif (Hambatan Teknis)	7	9,6%
Total	**73**	**100%**

Sumber: Data Diskominfo Kab. Cirebon 2026

Kepemimpinan fasilitatif ini juga dibuktikan dengan alokasi anggaran operasional tahun 2025 sebesar Rp 17,3 miliar, yang menunjukkan komitmen kuat Diskominfo dalam memfasilitasi kebutuhan sarana bagi dinas lainnya.

3.4. *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi)

Proses kolaborasi di Kabupaten Cirebon melibatkan interaksi berkesinambungan melalui dialog tatap muka dan *trust building*. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak swasta ahli IT (21 Januari 2026), kolaborasi terjalin tidak hanya dalam aspek pengadaan sistem, tetapi juga dalam konsultasi arsitektur teknologi.

"Kami diundang dalam forum diskusi Smart City bukan hanya sebagai penyedia jasa, tetapi juga sebagai mitra strategis untuk memberikan masukan terhadap arsitektur sistem," ungkap informan pihak swasta.

Pada aspek *shared understanding*, Diskominfo telah berhasil menyamakan persepsi antar-OPD mengenai pentingnya Satu Data Kabupaten. Integrasi ini membuahkan *intermediate outcome* (hasil sementara) berupa layanan darurat 112 yang berhasil menangani 42 kejadian darurat sepanjang 2025, serta digitalisasi perizinan yang kini lebih praktis dibandingkan metode manual.

3.5. Strategi Diskominfo dalam Mendukung *Smart City*

Strategi Diskominfo diwujudkan melalui tujuh langkah utama Penguatan Tata Kelola *Smart Governance*: Melalui integrasi seluruh kebijakan ke dalam kerangka SPBE. Infrastruktur Digital: Pengelolaan 24 server dan perluasan jaringan *broadband*. Integrasi Sistem: Menyatukan 48 aplikasi layanan (seperti JDIH, LPSE, Simpad) ke dalam satu pintu. Kapasitas SDM: Pelatihan digital intensif bagi aparatur desa dan kecamatan. Kemitraan Swasta: Melibatkan sektor swasta untuk menyediakan solusi teknis yang adaptif. Evaluasi Berkala: Monitoring *real-time* melalui *Command Center*. Sosialisasi Literasi: Edukasi masyarakat melalui media pertunjukan rakyat dan mobil wawar keliling untuk menjangkau warga di wilayah terpencil.

3.6. Diskusi Temuan Utama

Temuan penelitian ini memperkuat teori Ansell dan Gash (2007) bahwa *Collaborative Governance* merupakan kunci keberhasilan tata kelola digital. Keberhasilan Kabupaten Cirebon dalam meraih predikat "Sangat Baik" pada Indeks SPBE (skor 3,43) membuktikan bahwa integrasi antar-aktor (Pemerintah, Swasta, Masyarakat) efektif meningkatkan efisiensi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Yahya & Sudarmo (2022) yang menyatakan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan merupakan syarat mutlak dalam perwujudan *Smart City*. Berbeda dengan temuan Priyono (2022) yang menyebutkan tantangan besar pada aspek anggaran, penelitian ini menemukan bahwa melalui skema kolaborasi dengan sektor swasta, beban anggaran pemerintah dapat diefisienkan melalui alih daya teknologi yang lebih inovatif.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa tantangan "humanis" lebih besar daripada tantangan "teknis". Meskipun sistem sudah canggih, literasi digital masyarakat usia lanjut masih menjadi kendala di lapangan. Hal ini diamini oleh informan masyarakat (Ibu Iis, 21 Januari 2026) yang menyatakan bahwa aplikasi sudah ada, tetapi perlu pendampingan langsung. Temuan ini menjadi pengingat bahwa *Smart City* tidak boleh meninggalkan aspek inklusivitas, dan strategi kolaborasi ke depan harus lebih banyak melibatkan elemen masyarakat sipil sebagai pendamping digital di tingkat desa .

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi *Smart City* di Kabupaten Cirebon melalui pendekatan *Collaborative Governance* telah berjalan secara efektif dan terintegrasi. Hal ini didukung oleh kepemimpinan fasilitatif Diskominfo dalam mengorkestrasi keterlibatan lintas sektor, desain kelembagaan yang formal dan transparan melalui regulasi daerah, serta proses kolaborasi yang mampu meminimalisir ego sektoral antarperangkat daerah. Keberhasilan ini terbukti melalui capaian Indeks SPBE yang masuk kategori sangat baik dan terciptanya ekosistem layanan digital yang lebih adaptif, efisien, serta didukung oleh partisipasi aktif dari sektor swasta dan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada durasi waktu pengumpulan data yang terbatas pada periode awal tahun 2026, sehingga dinamika implementasi *Smart City* dalam jangka waktu panjang belum dapat teramati secara penuh. Selain itu, penelitian ini berfokus pada lingkup internal organisasi Diskominfo dan pemangku kepentingan utama, sehingga belum mencakup analisis persepsi masyarakat pengguna layanan digital secara menyeluruh di seluruh wilayah kabupaten.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*) Penulis menyadari temuan penelitian ini masih bersifat mendalam pada sisi tata kelola. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat secara luas

terhadap layanan digital yang ada. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperluas fokus pada analisis dampak ekonomi dan sosial dari penerapan *Smart City* di tingkat kecamatan dan desa guna memastikan inklusivitas digital bagi seluruh lapisan masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan, akses data, dan dukungan penuh kepada penulis selama melaksanakan penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh informan dari pihak swasta dan masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi, serta semua pihak yang telah membantu kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agostino, D., Saliterer, I., & Steccolini, I. (2022). Digitalization, accounting and accountability: A literature review and reflections on future research in public services. *Financial Accountability and Management*, *38*(2), 152–176. https://doi.org/10.1111/faam.12301

Alhosani, K., & Alhashmi, S. M. (2024). Opportunities, challenges, and benefits of AI innovation in government services: a review. *Discover Artificial Intelligence*, *4*(1). https://doi.org/10.1007/s44163-024-00111-w

Amalia, R., Elmas, A. G. P., & Syafri, W. (2025). Open Recruitment for Senior Leadership Positions in the Provincial Government of Papua South. ... *Indonesia (JIM-ID)*, *4*(07), 681–692. https://doi.org/10.58471/esaprom.v4i07

Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2023). Public administration and politics meet turbulence: The search for robust governance responses. *Public Administration*, *101*(1), 3–22. https://doi.org/10.1111/padm.12874

Ardieansyah, A., Meiyenti, I., Mulya Nalien, E., & Sentosa, I. (2020). The Role of Tungku Tigo Sajarangan in The Community Development Planning of Minangkabau, Indonesia. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, *12*(2), 141–155. https://doi.org/10.33701/jtp.v12i2.881

Carstensen, M. B., Sørensen, E., & Torfing, J. (2023). Why we need bricoleurs to foster robust governance solutions in turbulent times. *Public Administration*, *101*(1), 36–52. https://doi.org/10.1111/padm.12857

Fahlevvi, M. R., Kusuma, K. A. P. I., & Anugerah, M. W. (2025). Integrasi Teknologi Digital dalam Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *6*(2), 236–249. https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i2.687

Fitriyanti, E. (2024). The Effect of Digital Transformation on Governance in Indonesia: A Case Study of e-Government Implementation in Public Services. *Journal of Political Innovation and Analysis*, *1*(1), 26–32. https://doi.org/10.59261/jpia.v1i1.3

Khairi, H. (2020). Local Elections (Pilkada): Money Politics and Cukong Democracy. *Jurnal Bina Praja*, *12*(2), 249–260. https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.249-260

Lim, S. S., & Lee, J. (2022). Aspirations, Human Capital Investment, and the Intergenerational Transmission of Poverty in Indonesia. In *Social Indicators Research* (Vol. 162, Issue 1). Springer

Netherlands. https://doi.org/10.1007/s11205-021-02843-z

Madjid, U., & Ulfiani, A. (2023). EFEKTIVITAS PROGRAM PELATIHAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA DALAM RANGKA MENURUNKAN TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN. *Ilmu Politik, Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, *6*(1), 109–128. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1738 VOLUME

Nurdin, I. N. (2022). Trend on Public Administration Research: Bibliometric Analysis. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, *14*(1), 57–65. https://doi.org/10.33701/jtp.v14i1.2530

Nurrahman, A., Sabaruddin, & Salma, R. N. L. (2022). Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP). *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, *2*(2), 106–125. https://doi.org/10.33701/jpkp.v7i1.5246

Ode, L., Rabil, M., Ode, W., Nurwansyah, A., Setiawan, F. A., Hasan, M. R., Apriyansa, A., Kebangsaan, U., Author, C., & Online, A. (2025). Analysis of User Acceptance of the EPDesKel Application within the Nagari Government of Agam Regency Using the EUCS Method. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, *7*(2), 181–200. https://doi.org/10.33701/jtkp.v7i2.5806

Pitono, A., & Averus, A. (2018). Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *20*(1), 15–21. https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i1.11677

Setiawan, F. A., Rezkiadi, F. S., Hardiansyah, R., Fahlevvi, M., & Apriyansa, A. (2025). Integrasi Big Data Dan Sistem Informasi Geospasial Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Indonesia. *Data Sciences Indonesia (DSI)*, *5*(1), 105–118. https://doi.org/10.47709/dsi.v5i1.6287

Yang, C., Gu, M., & Albitar, K. (2024). Government in the digital age: Exploring the impact of digital transformation on governmental efficiency. *Technological Forecasting and Social Change*, *208*(September), 123722. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123722

Zuiderwijk, A., Chen, Y. C., & Salem, F. (2021). Implications of the use of artificial intelligence in public governance: A systematic literature review and a research agenda. *Government Information Quarterly*, *38*(3). https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101577